



Judul : Rvisi undang-undang ITE: bahas 38 DIM, DPR segera bentuk panja
Tanggal : Selasa, 11 April 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Revisi Undang-Undang ITE Bahas 38 DIM, DPR Segera Bentuk Panja

DPR dan Pemerintah sepa-
kat membahas Rancangan
Undang-Undang (RUU) Per-
ubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 11 tahun
2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE).
Pembahasan atas perubahan
Undang-Undang ITE ini akan
dilanjutkan pada Mei men-
datang.

"Setelah kita mendengar-
pandangan fraksi-fraksi, maka
dapat kita simpulkan bahwa
fraksi-fraksi di Komisi I DPR
menyetujui untuk memba-
has RUU tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang
Nomor 11 tahun 2008 tentang
ITE bersama-sama dengan
Pemerintah," kata Wakil Ketua
Komisi I DPR Abdul Kharis
Almasyhari di Gedung Parle-
men, Jakarta, kemarin.

Kharis menuturkan, pemba-
hasan selanjutnya dilakukan
pada masa persidangan kelima
masa sidang tahun 2022-2023
mengingat masa persidangan
keempat ini berakhir pada
Kamis (13/4), pekan ini. Ada-
pun jadwal pembahasan akan
disesuaikan dengan jadwal-
jadwal rapat di Komisi I DPR
yang akan dimulai 16 Mei
2023.

Kharis menuturkan, Daftar
Inventarisasi Masalah (DIM)
RUU ITE sebanyak 38 yang
terdiri atas DIM usulan yang
bersifat tetap sebanyak tujuh
DIM, kemudian tujuh DIM
usulan perubahan redaksional,
dan 24 DIM usulan peruba-
han substansi. "Berikutnya
terdapat 16 DIM RUU usulan
baru dari fraksi serta DIM
penjelasan sebanyak 26 DIM,"
ujarnya.

Untuk pembahasan DIM ini,
sambung Kharis, akan diben-
tuk Panja dengan pimpinan
Panja 5 orang. Adapun anggota
panja per fraksi, yakni PDIP
berjumlah 6 anggota, kemud-
ian Golkar, Gerindra, Nasdem
dan PKB masing-masing 3
orang. Lalu Demokrat, PKS,
dan PAN masing-masing 2
orang. Dan terakhir PPP 1
orang. Total tim Panja DPR
berjumlah 25 anggota.

"Berikutnya terkait pemba-

hasan RUU perubahan kedua
atas Undang-Undang 11 tahun
2008 tentang ITE dilakukan
pada masa persidangan kelima
tahun sidang 2022-2023,"
tambah dia.

Sementara itu, anggota
Komisi I DPR Farah Puteri
Nahlia menuturkan, UU ITE
2008 sebelumnya telah menga-
lami perubahan pada 2016.
Selanjutnya, UU ITE kem-
bali mengalami revisi tahun
ini dengan mengikuti dinamika
dan perubahan masyarakat.
Khususnya dalam memenuhi
kebutuhan perlindungan hu-
kum bidang pemanfaatan tek-
nologi informasi dan transaksi
elektronik dengan lebih baik.

"Pemberian jaminan atas
hak kebebasan berpendapat
harus diseimbangkan dengan
penghargaan terhadap harkat
dan martabat kemanusiaan.
Tidak boleh tercederai oleh tin-
dakan-tindakan yang mengusik
nilai-nilai kemanusiaan mel-
alui tindakan penghinaan dan
atau pencemaran nama baik,"
tuturnya.

Farah berpandangan perlu
dilakukan perubahan atas UU
ITE lantaran terdapat pasal-
pasal dan penjelasan pasal
yang dirasa belum menjamin
pengakuan dan penghormatan
atas hak dan kebebasan orang
lain. "Berdasarkan pandangan
tersebut, Fraksi PAN meny-
takan siap membahas RUU
ITE sesuai dengan mekanisme
peraturan perundang-undangan
yang berlaku," jelasnya.

Menteri Komunikasi dan
Informasi (Menkominfo)
Johny G Plate menegaskan,
Pemerintah siap menindak-
lanjuti pembahasan revisi
Undang-Undang ITE ini.
Pemerintah juga telah mem-
bentuk Panja RUU ITE dengan
ketua Dirjen Aplikasi Infor-
matika Kementerian Kominfo
Semuel Abrijani Pangerapan,
Wakil Ketua Dirjen Peraturan
Perundang-undangan Kement-
erian Hukum dan HAM Nana
Mulyana. Juga dilengkapi oleh
sejumlah anggota dari wakil
Pemerintah lainnya termasuk
di dalamnya dari Direktorat
Ciber Polri. ■ KAL